

Peran Tim Pendamping Keluarga (TPK) Dalam Penurunan *Stunting* Di Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar

Siti Nur Hafidoh, Eka Askafi, Nisa Mutiara

¹Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar

²³Magister Manajemen Universitas Islam Kadiri

Email: sitinurhafidoh2@gmail.com

Abstract

The Blitar Regency Government prioritizes available resources to increase the coverage of services to the target group for the Acceleration of Stunting Reduction which includes adolescents, prospective brides/potential couples of childbearing age, pregnant women, lactating mothers and children aged 0 (zero) to 59 (fifty nine) months in order to support national priorities. This study aims to analyze how to optimize the role of the family assistance team in reducing stunting at the P3APPKB Office of Blitar Regency. The research method used is descriptive research with a qualitative approach. Informants of this study amounted to 8 people. Data analysis in this study used triangulation and was strengthened by focus group discussions. Based on the research results, it was found that the role of the family assistance team is very important in the context of reducing stunting in Blitar Regency, because in addition to implementing team assistance, it also makes innovations so that the assistance role can run optimally. However, there are still a number of obstacles that must be corrected, such as the lack of quality human resources for the family assistance team and the lack of massive outreach to the community.

Keywords: Role, Assistance, Stunting, Human Resources

A. Latar Belakang Teoritis

Stunting atau perawakan pendek merupakan suatu keadaan pertumbuhan pada anak di bawah lima tahun yang mengalami hambatan, keadaan gagal tumbuh tersebut diakibatkan karena terdapat kondisi tidak optimalnya asupan gizi yang diterima anak pada masa-masa awal kelahiran. Balita dengan perawakan tubuh yang tidak optimal dipahami sebagai kondisi terjadinya kekurangan nutrisi pada balita dan kejadian tersebut dipengaruhi berbagai penyebab yang mempengaruhi. Penyebab tersebut seperti keadaan secara sosial ekonomi orang tua balita, kecukupan asupan nutrisi pada ibu hamil, riwayat penyakit bayi, adanya kekurangan penerimaan gizi penyakit bayi, adanya kekurangan penerimaan gizi remaja, calon pengantin / calon pasangan usia subur (PUS), ibu hamil, ibu menyusui dan anak usia 0 (nol) hingga 59 (lima puluh sembilan) bulan dalam rangka mendukung prioritas nasional. Oleh sebab itu, dalam penyelenggaraan Percepatan penurunan stunting membutuhkan pendekatan intervensi yang komprehensif. Intervensi ini mencakup aspek penyediaan kehidupan berkeluarga,

pemenuhan asupan gizi, perbaikan pola asuh, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan serta peningkatan akses air minum serta sanitasi. Intervensi yang paling menentukan adalah mempersiapkan calon ibu, memberikan pelayanan maksimal kepada ibu hamil dan yang seimbang yang diberikan, serta minimnya pengetahuan orang tua tentang pola asuh yang harus dilakukan dalam seribu hari pertama kelahiran (Kemenkes RI, 2018).

Pemerintah Kabupaten Blitar memprioritaskan sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan cakupan pelayanan kepada kelompok sasaran Percepatan Penurunan *Stunting* yang meliputi memastikan persalinan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. ASI eksklusif diberikan dengan diawali melalui inisiasi menyusui dini dan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan yang dilakukan secara terus menerus oleh tenaga Kesehatan pada 1000 hari pertama kehidupan.

Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat khususnya keluarga membutuhkan pelayanan konseling kehamilan dan gizi keluarga, pelayanan kehamilan, serta pelayanan dukungan kepada

keluarga untuk dapat menyediakan gizi yang tepat bagi anggota keluarganya. Sekaitan hal tersebut, Dinas P3APPKB memandang perlu dilakukannya pendampingan keluarga berisiko Stunting dalam rangka mendekatkan pelayanan pencegahan Stunting kepada masyarakat. Tim pendamping bertugas melaksanakan deteksi dini faktor risiko Stunting dan melakukan upaya meminimalisir atau mencegah pengaruh bila terdapat faktor risiko Stunting di suatu keluarga.

Tugas pokok dari Tim Pendamping Keluarga adalah melakukan pendampingan terhadap keluarga yang memiliki kerawanan terhadap Stunting. Pendampingan Keluarga sendiri dimaknai sebagai serangkaian kegiatan yang meliputi penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan dan fasilitasi pemberian bantuan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan kepada keluarga dan/atau keluarga berisiko Stunting seperti ibu hamil, ibu pasca persalinan, anak usia 0 – 59 bulan, serta semua calon pengantin/calon pasangan usia subur melalui pendampingan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah untuk deteksi dini faktor risiko Stunting dan melakukan upaya meminimalisir atau pencegahan pengaruh dari faktor risiko Stunting.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara rinci, bagaimana optimalisasi peran Tim Pendamping Kelompok (TPK) dalam penurunan stunting di Kabupaten Blitar, mulai dari bagaimana peran pendampingan, apa saja kendala yang dialami, serta sejauh ini apakah sudah optimal pelaksanaan peran pendampingan TPK kepada sasaran di kabupaten Blitar.

Optimalisasi

Menurut Winardi (1996:363) optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan. Secara umum optimalisasi adalah pencarian nilai terbaik dari yang tersedia dari beberapa fungsi yang diberikan pada suatu konteks.

Peran

Menurut Syamsir (2014:86) Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran yang dilakukan (*actual role*). Dalam melaksanakan peran yang diembannya, terdapat faktor pendukung dan penghambat.

Pendampingan

Menurut Wiryasaputra (2006:57-59, Pendampingan adalah proses perjumpaan pertolongan antara pendamping dan orang yang didampingi. Perjumpaan itu bertujuan untuk menolong orang yang didampingi agar dapat menghayati keberadaannya dan mengalami pengalamannya secara penuh dan utuh, sehingga dapat menggunakan sumber-sumber yang tersedia untuk berubah, bertumbuh, dan berfungsi penuh secara fisik mental, spiritual dan sosial. Pendampingan terutama mengacu pada semangat, tindakan memedulikan dan mendampingi secara generik. Biasanya, pendampingan mengacu pada hubungan bantuan psikologis secara informal sebagai lawan pada hubungan bantuan psikologis secara formal dan profesional. Pendampingan bisa dihubungkan dengan sikap dan tindakan yang dilakukan oleh orang yang tidak berprofesi bantuan psikologis secara penuh waktu, namun menginginkan layanannya lebih manusiawi.

Tim Pendamping Keluarga (TPK)

Berdasarkan buku panduan pelaksanaan pendampingan keluarga yang dikeluarkan oleh BKKBN, Pendampingan keluarga adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan dan fasilitasi pemberian bantuan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan

akses informasi dan pelayanan keluarga dan/atau keluarga berisiko Stunting dengan sasaran prioritas yaitu ibu hamil, ibu pasca persalinan, anak usia 0 – 59 bulan, dan semua pelayanan konseling kehamilan dan gizi keluarga, pelayanan kehamilan, serta pelayanan dukungan kepada keluarga untuk dapat menyediakan gizi yang tepat bagi anggota keluarganya. Sekaitan hal tersebut, Dinas P3APPKB memandang perlu dilakukannya pendampingan keluarga berisiko Stunting dalam rangka mendekatkan pelayanan pencegahan Stunting kepada masyarakat. Tim pendamping bertugas melaksanakan deteksi dini faktor risiko Stunting dan melakukan upaya meminimalisir atau mencegah pengaruh bila terdapat faktor risiko Stunting di suatu keluarga.

Tugas pokok dari Tim Pendamping Keluarga adalah melakukan pendampingan terhadap keluarga yang memiliki kerawanan terhadap Stunting. Pendampingan Keluarga sendiri dimaknai sebagai serangkaian kegiatan yang meliputi penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan dan fasilitasi pemberian bantuan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan kepada keluarga dan/atau keluarga berisiko Stunting seperti ibu hamil, ibu pasca persalinan, anak usia 0 – 59 bulan, serta semua calon pengantin/calon pasangan usia subur melalui pendampingan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah untuk deteksi dini faktor risiko Stunting dan melakukan upaya meminimalisir atau pencegahan pengaruh dari faktor risiko Stunting.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara rinci, bagaimana optimalisasi peran Tim Pendamping Kelompok (TPK) dalam penurunan stunting di Kabupaten Blitar, mulai dari bagaimana peran pendampingan, apa saja kendala yang dialami, serta sejauh ini apakah sudah optimal pelaksanaan peran pendampingan TPK kepada sasaran di kabupaten Blitar.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif pendekatan kualitatif. Peneliti

sebagai orang yang melakukan observasi mengamati dengan cermat terhadap obyek penelitian. Untuk memperoleh data tentang penelitian ini, maka peneliti terjun langsung kelapangan. Kehadiran peneliti dalam penelitian ini berperan sebagai instrumen kunci yang berperan sebagai pengamat non partisipan, di mana peneliti turun kelapangan tidak melibatkan diri secara langsung dalam kehidupan obyek penelitian.

Prosedur pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka. Analisis data dilaksanakan melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. Kemudian keabsahan data di cek melalui triangulasi.

C. Hasil Dan Pembahasan

Hasil dari penelitian ini diperoleh dengan teknik wawancara mendalam secara langsung kepada informan sebagai bentuk pencarian dan dokumentasi langsung di lapangan. Peneliti juga menggunakan pendekatan kualitatif untuk melihat kondisi alami dari suatu fenomena. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman dan menggambarkan realitas yang kompleks.

Hasil wawancara secara mendalam terkait bagaimana peran, kendala apa saja yang dihadapi, serta bagaimana optimalisasi peran TPK dalam penurunan *Stunting* di Dinas P3APPKB diuraikan seperti berikut:

Peran Tim Pendamping Keluarga

Tim Pendamping Keluarga merupakan sekelompok tenaga yang dibentuk dan terdiri dari Bidan, Kader TP PKK dan Kader KB. Informasi terkait bagaimana peran TPK dalam melaksanakan tugasnya kepada sasaran dan apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan Buku Panduan Pelaksanaan Pendampingan Keluarga yang diterbitkan oleh BKKBN, Herman Widodo selaku Kepala Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar melalui wawancara yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 pukul 10.00 WIB mengungkapkan bahwa: "...TPK yang ada di level desa tentunya sudah diketahui terdiri dari bidan desa, kemudian kader KB dan juga dari PKK.

Menurut pengamatan kami apa yang sudah dilakukan oleh TPK yang ada di level desa ini sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh BKKBN yang ada di pusat maupun perwakilan yang ada di Prov. Jawa timur dimana mereka diharapkan bisa secepatnya mengidentifikasi permasalahan *Stunting* yang ada di desa sekaligus melakukan intervensi terhadap *Stunting* tersebut sesuai dengan spesifikasi masing-masing...”

Tanggapan yang dikemukakan oleh Munjiatin selaku Koordinator Penyuluh KB Kabupaten Blitar melalui wawancara yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 pukul 09.00 WIB, beliau menyatakan sebagai berikut:

“...Menurut kami yang melaksanakan monitoring evaluasi di wilayah, pelaksanaannya sudah sesuai dengan tupoksi masing-masing walaupun disitu ada 3 tim yang terdiri dari PKK, Kader KB, dan Nakes. Contoh ya bu dari unsur PKK disitu punya tugas sendiri beliau sebagai mediator dan fasilitator kepada sasaran kepada masyarakat, sedangkan dari kader KB itu mempunyai tugas sendiri sebagai administrasinya apa yang dicatat melalui kunjungan yang dilakukan sebagai evaluasi kunjungan berikutnya, sedangkan dari nakes ada tugas sendiri sebagai skrining, selain itu juga menjadi koordinator dan bertanggungjawab terhadap tim. Jadi satu tim ini harus bekerja bersama untuk menjalankan tugas masing-masing. Jadi walaupun ada 3 tim ada ketuanya yang berasal dari bidan atau nakesnya...”

Tanggapan lainnya disampaikan oleh Tri Gunawan selaku Kepala Bidang Keluarga Berencana Dinas P3APKB Kabupaten Blitar melalui wawancara yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 pukul 09.00 WIB dengan mengatakan:

“...Jadi dalam setiap pelaksanaan pekerjaan pasti ada juknis disitu, yang hal ini berkaitan dengan tim pendampingan keluarga BKKBN kita juga punya juknis yang ditetapkan atau disahkan oleh BKKBN pusat. Jadi tim pendamping keluarga itu sudah ada SOP nya secara tertulis. Dimana tim pendamping keluarga itu terdiri dari 3 unsur, mulai dari unsur dari PKK, Bidan / Tenaga kesehatan,

dan juga dari Kader KB. Jadi kita melaksanakan pendampingan keluarga itu hanya berdasarkan Juknis yang telah ditetapkan oleh BKKBN...”

Tanggapan dari Nurbeti Listiana selaku Kader KB Kelurahan Tawang Sari melalui wawancara yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 pukul 08.00 WIB ini lebih memperkuat hasil dari wawancara sebelumnya dengan mengatakan:

“...Tugas secara umum hampir sama tetapi untuk kader PKK sebagai penggerak, kemudian untuk bidan adalah koordinator dan sekaligus beliau memfasilitasi untuk skrining dan pelayanan kesehatan tentunya dan juga konseling, untuk kader KB tugas kami sebenarnya adalah pencatatan dan pelaporan tetapi pada praktek di lapangan kader KB tetap merupakan garda terdepan dalam menggerakkan pendampingan di lapangan seperti itu...”

Tanggapan lainnya disampaikan oleh Nanik Trisnawati selaku Kader PKK Kelurahan Bence melalui wawancara yang dilaksanakan pada Senin tanggal 30 Januari 2023 pukul 09.00 WIB, beliau mengatakan bahwa:

“...Kalau saya sebagai kader PKK yaitu selama ini kami melakukan penyuluhan pertama bu sebagai apa istilahnya untuk memfasilitasi kader KB kemudian dengan bu bidan, kemudian sebagai surveilensi kami melakukannya dengan terus menerus karena pencegahan *Stunting* ini kan juga penting bu dikarenakan harus terus menerus tidak bisa istilahnya instan. Seperti itu nggih. Sebagai kader PKK jadi penggerak. Kalau dari bidannya ya sebagai apa ya bu istilahnya ya bu kalau kita turun beliaunya kan penyuluh kemudian memberi wawasan kemudian memberi pemeriksaan kalau sasaran itu belum melakukan pemeriksaan. Kalau kader KB selain penyuluhan tentang masalah KB juga menyarankan untuk segera ber KB kemudian ibu juga disarankan untuk menjaga jarak dari kelahiran satu dan berikutnya ini juga catinnya belum cukup umur ini disarankan untuk menunda dulu...”

Informasi yang didapatkan dari wawancara dengan beberapa narasumber

tersebut adalah pelaksanaan tugas Tim Pendamping Keluarga (TPK) sudah sesuai dengan SOP yang tertuang pada Panduan Pelaksanaan Pendampingan Keluarga BKKBN. Secara garis besar tugas dari Kader TP-PKK ini adalah sebagai penggerak, mediator, dan fasilitator bagi warganya atau sasaran agar bersedia dilakukan pendampingan. Kemudian Kader KB yaitu lebih kepada pendataan, administrasi dan juga sebagai penyuluh terkait akan melakukan KB apa nantinya setelah melahirkan. Kemudian Bidan yang bertugas sebagai ketua tim atau koordinator dimana juga menerima konseling tentang kesehatan dan juga memberikan rujukan apabila itu diperlukan. Sehingga bisa dikatakan bahwa TPK ini merupakan ujung tombak dalam pencegahan *Stunting* karena langsung terjun kepada sasaran atau kepada masyarakat.

Kendala Peran Tim Pendamping Keluarga

Setiap program yang dilaksanakan tentu ada kendala yang dihadapi, beberapa kendala yang di hadapi oleh TPK dalam melaksanakan tugasnya seperti diungkapkan oleh Munjiatin selaku Koordinator Penyuluh KB Kabupaten Blitar melalui wawancara yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 pukul 09.00 WIB berikut ini: "... Jadi begini tentunya setiap program ini pasti ada kendala, tapi insya allah bisa di antisipasi dengan kerjasama yang baik. Kalau kendala yang muncul yang pertama adalah dari TPK sendiri dari 3 unsur ini untuk mencari waktu pendampingan secara bersamaan itu kesulitan karena dari 3 unsur ini memiliki kesibukan masing-masing. Catin ini diharapkan pendampingannya sebelum menikah itu minimal 3 bulan sebelum menikah, kemudian bumil ini minimal didampingi TPK minimal 8 kali pendampingan, untuk pasca ini minimal 2 kali pendampingan. Kalau terkait dengan catin kendalanya begini bu, yang pertama TPK itu kadang tidak tahu kalau ada yang menikah, diketahui oleh TPK itu waktunya sudah dekat, kadang 2 bulan kadang 2 minggu padahal kan idealnya 3 bulan sebelumnya sehingga kurang maksimal.

Selanjutnya untuk catin itu takut untuk mendownload aplikasi elsimil, padahal harapannya melalui aplikasi elsimil ini sebenarnya catin mendapatkan edukasi terkait dengan bagaimana kesiapan menjadi orang tua dan hamil yang sehat sehingga nantinya melahirkan generasi-generasi yang bagus. Jadi merasa tidak perlu untuk menggunakan aplikasi elsimil. Bahkan ada juga kendala itu malah justru yang berasal dari perangkat atau pak modin bahwa menganggap bahwa itu bukan persyaratan nikah jadi ndak perlu, padahal kalau kita simak malah bagus di dalam aplikasi elsimil itu ada edukasi yaitu kesiapan calon pengantin untuk mempersiapkan dirinya dalam kehamilan ada step-stepnya sampai dia siap menikah siap hamil. Dengan mengikuti itu kan ada kuisisionernya yang di isi catin sehingga tau oh seperti ini ya kalau mau menikah itu apa yang harus dipersiapkan mentalnya fisiknya kesehatan secara utuh harus pemeriksaan kesehatan itu tau dan netnya itu jadi tau apakah dia ideal menikah atau ndak, contoh itu kana da umur ideal menikah kalau perempuan minimal 21 misalnya kalau catin dibawah umur itu sehingga muncullah pasangan ini tidak ideal seperti itu bisa terpengaruh dari umur dan kesehatannya diukur dari ukuran lila kana da juga berapa yang harus dipenuhi kalau dibawah 23 kan harus dipenuhi tapi bukan berarti menggagalkan pernikahan. Misalkan lalik-laki merokok itu tidak ideal tapi bukan menggagalkan menikah tapi harus diperbaharui juga. Terus berikutnya yang ada di bumil itu kan 8 kali pendampingan ya, kadang-kadang juga seperti itu apalagi bumil yang tidak diinginkan kehamilannya ini kan di tutup-tutup i sehingga kan pendamping tidak tahu dan bumil sendiri kurang proaktif dan keluarganya kalau ditanya juga di sembunyi-sembunyi sehingga pendamping kurang dapat mengurai permasalahannya apa yang harus ditangani apa. Terus yang pasca ini, sama saja semuanya ada plus minusnya tapi kalau pasca tidak banyak kendala, karena kan ini sudah didampingi sejak catin, bumil dan pasca jadi sudah familier sehingga lebih enak untuk dilakukan pendampingan. Setiap tahapan pendampingan kan ada materi tersendiri jadi memang sudah dibekali kalau pada catin apa yang disampaikan bumil apa dan pasca apa sudah ada sendiri-sendiri. kalau bumil itu kan

sudah dibekali sampai bagaimana nanti KB nya apa. Sehingga ketika pasca sudah tahu nanti sasaran harus bagaimana seperti apa dan mau KB apa yang aman serta faskes mana yang harus didatangi...”

“...Saya kebetulan di kecamatan kanigoro kebetulan dan saya juga menjadi ketua ipeKB di kabupaten blitar, ipeKB adalah ikatan penyuluh keluarga berencana, sementara ini menjadi kendala juga PKB jumlahnya semakin sedikit karena banyak yang pensiun, rata-rata kalau saya lihat hanya ada 2 per kecamatan bu, rata-rata sekitar 12 desa per kecamatan. Ini yang masih banyak hanya kecamatan srengat dan ponggok itu ada 4 PKB tapi desanya juga banyak, jadi 1 PKB ini membawahi 5 sampai 6 desa. Jadi dengan adanya TPK ini sangat-sangat membantu kinerja PKB jadi dalam melaksanakan penurunan *Stunting* ini kinerja TPK ini dibawah PKB walaupun ada kendala sangat membantu...”

Pendapat lainnya disampaikan oleh Herman Widodo selaku Kepala Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar melalui wawancara yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 pukul 10.00 WIB, beliau mengatakan bahwa:

“...Saya kira kalau kendala pasti ada, tentunya ini bukan menjadi suatu alasan untuk tidak menjalankan kegiatan secara maksimal. Salah satu contoh mungkin kendala yang sering dikeluhkan adalah untuk pendampingan honorariumnya terlalu sedikit terlebih untuk situasi di pedesaan dimana untuk melakukan pendampingan kepada ibu hamil dan catin rasanya juga tidak lazim kalau sudah kenal mereka ada sambutan menerima bayi baru lahir atau mau menikah mereka tidak datang untuk berbagi kebahagiaan rasanya jengah, kalau mau datang tidak sepadan dengan honorarium yang diterima. Untuk kendala yang lain perlu ditingkatkan koordinasi yang lebih intensive supaya betul-betul bisa menghasilkan identifikasi yang maksimal dan penanganan yang lebih maksimal lagi...”

Pendapat lainnya diungkapkan oleh Nurbeti Listiana selaku kader KB Kelurahan Tawangsari melalui wawancara yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 pukul 08.00 WIB yang mengatakan:

“...Kendala untuk tim yang saya alami nggih bu kebetulan karena saya PPKBD kelurahan tawangsari jadi kendala dalam kerja tim saya karena terkait tim bidan dan PKK otomatis karena bu bidan sangat sibuk kita sama-sama tahu dan ketua PKK juga kurang lebih sama akhirnya untuk tim yang satu dengan PPKBD itu otomatis kita sering berjalan sendiri dalam pendampingan maupun dalam pencatatan dan pelaporan. Yang seperti yang saya alami di lapangan bu...”

“...Untuk kendala yang lain untuk satu kelurahan itu ada beberapa kendala bu yang kita alami, yang pertama karena ketidaksamaan kemampuan SDM sumber daya manusia dari masing-masing kader TPK dan pengetahuan yang tidak sama kurang memadai kurang apa ya maksudnya SDMnya tidak sama sehingga ada permasalahan di lapangan ketika memiliki kemampuan komunikasi yang tidak sama antar kader TPK satu dengan yang lain itu menjadi kendala ketika kita melakukan penyuluhan kepada sasaran, kemudian yang kedua kurangnya pengetahuan dari sasaran tentang apa itu *Stunting* dan tentang pentingnya diadakan pendampingan oleh TPK, kemudian yang ketiga tidak setiap kader memiliki kemampuan yang memadai tentang IT atau gadget sehingga ada kendala ketika memasukkan pelaporan di aplikasi ini juga menjadi kendala sehingga tidak jarang untuk satu tim ada 2 yang memiliki kekurangan kemampuan di IT jadi yang bekerja hanya satu seperti itu...”

“...Ada, masing-masing ada aplikasi sendiri, kalau untuk catin menggunakan elsimil, elsimil catin dan pendamping kemudian untuk ibu hamil kita punya link sendiri untuk pemantauan ibu hamil, dan yang untuk ibu bersalin ada sendiri linknya, kados ngoten. Kemudian ada lagi bu kendalanya aplikasi yang kadang-kadang trouble seperti 3 hari kemarin itu ada aplikasi elsimil catinnya yang

trouble sehingga kita sudah melakukan kunjungan untuk pendampingan sudah kita arahkan untuk unduh aplikasi melalui play store sudah sesuai tahapan ternyata ada kendala tidak bisa masuk, ternyata hal semacam ini karena ada trouble di elsimil catin dan kami tidak mendapatkan informasi dari kabupaten ketika ada trouble sehingga kami merasa kok ini gagal lagi gagal lagi kenapa ternyata kami tanyakan ke sesama tim TPK dari desa lain ternyata ada trobel akhirnya kan ini juga kendala ketika kami melakukan pendampingan sehingga data yang seharusnya masuk hari ini harus tertunda 3 hari berikutnya baru tadi malam sudah bisa kita lakukan pendampingan lagi. Seperti kurang lebih yang saya alami bu...”

Nanik Trisnawati selaku kader PKK melalui wawancara yang dilaksanakan pada Senin tanggal 30 Januari 2023 pukul 09.00 WIB juga berpendapat bahwa ada kendala yang dialami, beliau mengatakan:

“...Insya allah tetep ada bu soalnya kita kan 3 orang ini punya kegiatan sendiri sendiri jadi harus mengkondisikan untuk ke lapangan waktunya kapan harinya apa itu kan kita harus bisa menjadwalkan soalnya kadang kita udah jadwalkan ternyata bu bidannya tidak bisa ada rapat mendadak atau ada pasien melahirkan begitu bu...”

“...Kendala kita selama ini nggeh bu kadang nganu kalau kita ke lapangan itu seolah olah kita memberikan bantuan sumbangan. Pola piker masyarakat Indonesia itu dikira dikasih bantuan. Beh aku di data aku nko oleh bantuan. Meskipun orang mampu maupun tidak mampu...”

Pendapat lainnya diungkapkan oleh Atik Umayya selaku Bidan Desa Kendalrejo Kecamatan Talun melalui wawancara yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 30 januari 2023 pukul 08.00 WIB yang mengatakan:

“...Mungkin ini ya tidak semua tpk aktif ya sesekali perlu refreshing untuk tpk, refreshing itu dalam arti mererefresh kembali tugas tpk itu seperti apa jadi mereka bisa melaksanakan tugas sesuai SOP...”

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa TPK mengalami beberapa kendala dalam melaksanakan perannya di lapangan. Kendala pertama yang dialami adalah di beberapa wilayah TPK masih kurang aktif dalam melaksanakan pendampingan, juga terkendala kesibukan masing-masing kader sehingga membuat tidak bisa melaksanakan pendampingan secara bersama-sama.

Selain itu Karena TPK ini bersinggungan langsung dengan sasaran /masyarakat, seringkali TPK ini dikira tim pemberian bantuan. Kemudian juga masyarakat kurang terbuka dan tidak mau memberikan informasi saat dilakukan pendampingan, bahkan ada juga mayarakat yang merasa tidak perlu didampingi karena merasa tidak memiliki keluhan apapun. Selain dari unsur masyarakat, dari unsur perangkat desa juga ada kendala seperti kurang berkomunikasi aktif dengan TPK dalam hal untuk pendampingan calon pengantin yang harus mendownload aplikasi elsimil, padahal di dalam aplikasi itu ada banyak edukasi terkait bagaimana mempersiapkan diri sebagai orang tua. Kendala lainnya adalah kendala teknis, seperti aplikasi yang kadang macet dan Evaluasi dan Inovasi Peran TPK

Optimalisasi Peran Tim Pendamping Keluarga

TPK itu harus lebih berinovatif dan berinisiatif dalam melakukan pendampingan kepada keluarga-keluarga beresiko *Stunting* dalam rangka optimalisasi peran TPK. Hal ini bertujuan supaya mengurangi beberapa kendala yang ada ketika melaksanakan pendampingan. Seperti pendapat yang diungkapkan oleh Munjiatin selaku Koordinator Penyuluh KB Kabupaten Blitar melalui wawancara yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 pukul 09.00 WIB, terkait inovasi TPK, beliau mengungkapkan:

“...Alhamdulillah bu ini sudah ada MOU mulai kecamatan sampai kabupaten. Sehingga ketika ada catin mulai dari bahasanya rapak itu sudah satu misi satu suara jadi yang tadi misalnya catinnya

kendalanya masih sulit pak modinnya itu agak belum paham sekarang sudah adanya MOU itu sangat membantu juga...”

“...Kami punya Pin sebagai identitas TPK ketika mereka pendampingan ke sasaran sehingga lebih enak punya identitas kalau hadir o itu TPK sehingga masyarakat semakin tahu, diberikan kepada semua TPK sehingga kalau menjalankan tugasnya sudah menggunakan PIN itu ditaruh di dada sehingga sudah dikenal masyarakat. Karena masyarakat kalau didatangi itu sudah mengira kalau ada apa-apanya...”

Pendapat lain disampaikan oleh Nurbeti Listiana selaku Kader KB Kelurahan Tawangsari melalui wawancara yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 pukul 08.00 WIB yang menyatakan:

“...Njih pasti bu karena sebagai kader pendamping kita harus pandai-pandai memiliki trik untuk kita bisa mendapatkan data, melakukan pendampingan pemantauan secara optimal dan maksimal. Inovasi yang sudah kami lakukan yang pertama untuk catin kami bersinergi dengan pegawai pencatat nikah di wilayah, jadi otomatis setiap ada calon pengantin yang mau mendaftarkan melalui PPM itu nanti pak modin setempat langsung menghubungi kami sebagai kader pendamping dan catin nanti akan mencari kita untuk saat ini seperti itu tetapi sebelumnya kami bersinergi koordinasi dengan RT, RW kelurahan setempat untuk memberikan sosialisasi kepada bapak RT RW tentang pendampingan calon pengantin ini begitu pentingnya untuk catin sehingga ketika mereka minta untuk surat pengantar kepada pak RT pak RW langsung disampaikan untuk segera menemui kader TPK itu untuk catin bu. Kemudian untuk ibu hamil inovasi yang sudah kami lakukan karena wilayah agak luas dan kita kunjungan satu per satu juga agak lumayan menyita waktu akhirnya kami bersinergi dengan ibu bidan wilayah untuk melaksanakan pendampingan itu melalui kegiatan senam hamil itu yang diadakan di poskesdes. Bu bidan memberikan informasi kepada kami hari ini ada sekian ibu hamil yang melaksanakan senam hamil di poskesdes, kami mendatangi poskesdes dan

langsung otomatis mendapatkan beberapa ibu hamil dan dalam waktu yang sama kita lakukan pendampingan. Menurut saya itu inovasi karena bisa efisien di waktu. Tidak harus selalu di rumahnya. Kecuali yang tidak kegiatan senam hamil. Kemudian untuk ibu bersalin kami juga bersinergi dengan kader PPKBD, IMP di wilayah untuk pertama kali mendapatkan data dari kader yang paling dekat dengan ibu hamil sehingga ketika ada data masuk ke kami langsung kami tindaklanjuti dengan pendampingan dan kunjungan. Yang selanjutnya kami juga bersinergi dengan ibu bidan ketika ibi bersalin pasca Salin ini melakukan imunisasi bayinya ke poskesdes karena untuk saat ini semua imunisasi tidak di posyandu tetapi di datangkan di jadwal ke poskesdes secara bergantian jadi kita langsung pendampingan di waktu yang sama. Kemudian kami juga bersinergi dengan kader posyandu balita untuk pelaksanaan posyandu balita. Ketika kita belum kunjungan rumah dan nada jadwal posyandu balita kami juga langsung melakukan pendampingan dank arena kebetulan kami kader PPKBD maka setiap bulannya keliling itu mempermudah sekali jalan udah dapat beberapa. Kemudian yang terakhir yang sudah kami melakukan pendampingan dengan memberikan

service pelayanan saya melakukan pendampingan mengantar sasaran ibu hamil yang belum melakukan KB menuju tempat pelayanan KB di pelaksanaan KB safari di wilayah kecamatan garum. Demikian bu. Ada lagi bu yang belum saya sampaikan kendala ketika kunjungan rumah dan Alhamdulillah sudah ada solusi ketika kami sudah mendapatkan PIN dari dinas P3APPKB sehingga ketika kami melakukan kunjungan tidak perlu menjelaskan lagi secara panjang lebar siapa kami yang sebelumnya kita dikira mau minta bantuan dan mendata mendapat bantuan untuk sekarang kami sudah lebu mudah lagi masuk mempermudah di lapangan...”

Nanik Trisnawati selaku Kader PKK Kelurahan Bence melalui wawancara yang dilaksanakan pada Senin tanggal 30 Januari 2023 pukul 09.00 WIB juga menyampaikan bahwa:

“...Kita sebagai tim saling mengisi aja bu karena itu tadi kalau jalan bersama pasti tidak

bisa, untuk pelayanan ya kita itu tadi anu jemput bola biar semuanya terakomodasi. Terus kalau untuk kita untuk mencari missal belum punya KIS kita bantu untuk bisa mendapatkan KIS jadi saling membantu kader PKK Kader KB sama bidan...”

“...Kita anu bu seperti balita yang *Stunting* itu waktu kita mengusahakan untuk mendapatkan PMT baik dari pihak kelurahan maupun puskesmas...”

Dari hasil wawancara tersebut tentunya kita dapat mengetahui informasi bahwa meskipun beberapa kendala dialami, namun TPK juga tidak kehilangan akal untuk terus bisa melaksanakan perannya dengan baik, TPK membuat inovasi seperti sering melaksanakan koordinasi, mengadakan MOU, memasang tulisan-tulisan pencegahan stunting dan menggunakan identitas pin TPK. Sehingga peran TPK dinilai sudah maksimal, seperti yang disampaikan oleh Ahmadi Sukanan selaku Kepala Desa Kendalrejo Kecamatan Talun melalui wawancara yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 06 Januari 2023 pukul 08.30 WIB, beliau menyatakan: “...Sebetulnya sudah maksimal tapi perlu saya maksimalkan lagi, karena di kendalrejo ini apa ini warganya itu katakan profilnya itu menengan kebawah dan jumlahnya penduduk kendalrejo itu dibandingkan dengan desa lain di kecamatan talun ini banyak sekali bu, lebih dari 12 ribu 4 dusun tersebut...”

Pendapat lainnya disampaikan oleh Sukiyani Jamil selaku Ketua RT Desa Papungan Kecamatan Kanigoro melalui wawancara yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 06 Januari 2023 pukul 10.00 WIB, beliau menyatakan:

“...Sejauh ini memiliki kinerja yang maksimal terlihat dari yang dulu-dulunya orang mau menikah itu hanya minta surat dari desa kemudian ke modin sudah, kalau sekarang diberikan edukasi kemudian juga adanya sertifikat elsimil mereka semakin terbuka wawasannya tentang pentingnya menyiapkan kehamilan menyiapkan pernikahannya sehingga dari sini juga

banyak catin itu ketika menikah itu dengan tubuh yang fit kemudian juga diberikan faksin itu juga tidak memiliki efek samping yang berlebihan intinya dengan tim tpk ini membuka mata dari warga sangat luas mengenai kesehatannya dan masih banyak lagi intinya bekerja secara maksimal di papungan...”

Senada dengan pendapat sebelumnya, Herman Widodo selaku Kepala Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar melalui wawancara yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 pukul 10.00 WIB, beliau mengatakan bahwa: “...tentunya kalau kita melihat kinerja yang telah dilaksanakan oleh teman-teman TPK baik di pencegahan maupun di penanganan untuk kasus *Stunting* sudah cukup maksimal dan tentunya sebagai tolok ukurnya kita lihat di laporan pada akhir 2022 yang saat ini sedang berproses berapa tingkat percepatan penurunan *Stunting*. Jadi nanti akan kita lihat berdasarkan jumlah penurunannya dari tahun 2021 sampai dengan 2022...”

Karena kegigihan dan kerja keras itulah maka penilaian di masyarakat pun sangat baik saat ini. TPK dinilai dapat melaksanakan tugasnya dengan sesuai SOP dan sangat telaten dalam mendampingi sasaran.

Pembahasan

Tim Pendamping Keluarga merupakan sekelompok tenaga yang dibentuk dan terdiri dari Bidan, Kader TP PKK dan Kader KB untuk melaksanakan pendampingan meliputi penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan dan fasilitasi penerimaan program bantuan sosial kepada calon pengantin/calon pasangan usia subur, ibu hamil, ibu pasca persalinan, anak usia 0-59 bulan serta melakukan surveilans keluarga berisiko *Stunting* untuk mendeteksi dini faktor-faktor risiko *Stunting*. Dalam berbagai kondisi, komposisi tim pendamping keluarga dapat disesuaikan melalui bekerjasama dengan Bidan dari Desa/Kelurahan lainnya atau melibatkan perawat atau tenaga kesehatan lainnya.

Peran Tim Pendamping Keluarga

Sesuai dengan Buku Panduan Pelaksanaan Pendampingan Keluarga yang diterbitkan oleh BKKBN, Tugas pokok dari Tim Pendamping Keluarga adalah melakukan pendampingan terhadap keluarga yang memiliki kerawanan terhadap *Stunting*. Pendampingan Keluarga sendiri dimaknai sebagai serangkaian kegiatan yang meliputi penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan dan fasilitasi pemberian bantuan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan kepada keluarga dan/atau keluarga beresiko *Stunting* seperti ibu hamil, ibu pasca persalinan, anak usia 0 – 59 bulan, serta semua calon pengantin/calon pasangan usia subur melalui pendampingan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah untuk deteksi dini faktor risiko *Stunting* dan melakukan upaya meminimalisir atau pencegahan pengaruh dari faktor risiko *Stunting*.

Selain itu ada tugas khusus yang harus dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga, yakni:

Melakukan skrining 3 bulan pra nikah kepada catin untuk mengetahui factor resiko *Stunting*, dalam upaya menghilangkan factor resiko tersebut.

Melakukan pendampingan kepada semua bumil dengan melakukan pemantauan/pemeriksaan kehamilan secara berkala, melakukan KIE KB pasca salin dan melakukan rujukan bila diperlukan.

Sehingga bisa digambarkan peran masing-masing contohnya dari unsur TP-PKK, disitu punya tugas sendiri, beliau sebagai mediator dan fasilitator kepada sasaran dalam hal ini adalah masyarakat atau bisa dikatakan sebagai penggerak agar masyarakat itu mau di dampingi. Karena kan unsur dari TP-PKK ini biasanya bu lurah, sehingga masyarakat ketika yang terjun ke lapangan itu langsung bu lurah merasa diayomi tidak langsung berburuk sangka seperti ketika tim petugas kesehatan yang datang. Selain itu melalui bu lurah juga bisa telaten dan luwes untuk memberikan arahan dan sosialisasi pentingnya pendampingan yang secara tidak resmi seperti pada saat ada

acara yasinan. Dengan seringnya dilaksanakan sosialisasi yang *massive* secara tidak langsung lambat laun pengetahuan masyarakat akan pentingnya pendampingan TPk dalam rangka penurunan *Stunting* ini juga akan meningkat. Selanjutnya tupoksi dari kader KB itu sebagai administrator. Administrator dalam arti melakukan pendampingan sesuai data dari Dinkes maupun KUA. Berapa catin yang sudah dikunjungi, berapa ibu hamil yang harus dikunjungi, serta bagaimana kondisi sasaran ini setelah dikunjungi apakah catin sudah ideal, kemudian apakah ibu hamil perlu rujukan, atau apakah ibu pasca hamil sudah menentukan akan memakai KB apa, nah hasil kunjungan ini akan di input kedalam laporan baik melalui aplikasi elsimil ataupun melalui google form. Kemudian juga sebagai evaluasi untuk kunjungan berikutnya. Yang terakhir adalah dari unsur nakes. Dari unsur nakes ini biasanya adalah bidan desa dimana tugas bidan adalah sebagai koordinator tim dan sekaligus beliau memfasilitasi untuk skrining dan pelayanan kesehatan tentunya dan juga konseling. Artinya ketika ada sasaran yang membutuhkan rujukan langsung siap untuk membantu, bahkan ada juga di wilayahnya yang bidan desa nya bahkan aktif sampai mendampingi bumil ke rumah sakit untuk memastikan mendapatkan penanganan yang tepat. Selain itu dalam tim, bidan ini juga mempunyai peran penting sebagai koordinator, ketika kader KB atau kader dari TP-PKK ini mengalami keluhan dari masyarakat atau mengalami kendala dalam pendampingan bidan desa ini siap membantu karena terkadang ketika Kader KB dan Kader TP-PKK melaksanakan pendampingan ada penjelasan terkait kesehatan yang tidak dipahami nah itu akan diarahkan ke Bidan Desa. Artinya meskipun pendampingan ke sasaran ini tidak bisa dilakukan secara bersama-sama akan tetapi dalam tim selalu dilaksanakan koordinasi dan komunikasi sehingga setiap hasil pendampingan tim mengetahui dan apabila ada suatu masalah dapat segera diketahui solusinya. Mengingat tugasnya yang cukup menantang, TPK telah dan akan terus dilatih dengan berbagai kemampuan.

Kendala Peran Tim Pendamping Keluarga

Secara garis besar Tim Pendamping Keluarga (TPK) bertugas melakukan penyuluhan, memfasilitasi pelayanan rujukan dan memfasilitasi pemberian bantuan sosial serta melakukan surveilans kepada sasaran keluarga berisiko *Stunting*. Karena peran pendampingan TPK ini langsung menuju sasaran dalam hal ini adalah langsung kepada masyarakat, tentunya banyak kendala yang dihadapi

Dalam pelaksanaan pendampingan ini, karena kesibukan masing-masing kader sehingga untuk melaksanakan pendampingan secara bersamaan itu sulit, namun demikian hal tersebut bisa diatasi dengan kerjasama yang baik antar kader. Kendala lainnya terkait internal TPK adalah kurangnya kesejahteraan dalam hal ini honor dan juga beberapa kader kurang memahami tentang IT. Sehingga terkait sosialisasi aplikasi atau membimbing sasaran untuk men-*download* aplikasi itu masih kurang.

Kendala lain yang dialami adalah terkait pendampingan Calon Pengantin atau biasa disebut Catin. Catin ini diharapkan pendampingannya dilaksanakan minimal 3 bulan sebelum hari-H pernikahan. Namun demikian, TPK baru mengetahui kalau ada calon pengantin yang menikah itu sudah mendekati hari pernikahannya, seperti H-2 minggu atau H-1 bulan sehingga pendampingan yang dilaksanakan menjadi tidak ideal. Hal seperti ini seringkali terjadi pada catin yang bekerja di luar kota, sehingga untuk kepulangannya ke kampung halaman itu hanya sebentar dalam rangka memenuhi administrasi untuk menikah. Tentunya hal ini juga perlu komunikasi dan koordinasi yang lebih baik lagi dengan Modin Desa yang mengusui persyaratan pernikahan maupun dengan KUA setempat. Masih terkait pendampingan catin kendala lainnya adalah catin itu takut untuk mendownload aplikasi *elsimil*, padahal harapannya melalui aplikasi *elsimil* ini catin bisa mendapatkan edukasi terkait dengan persiapan menjadi orang tua dan hamil yang sehat sehingga nantinya akan melahirkan generasi-generasi yang sehat pula.

Karena kurangnya edukasi tentang pentingnya men-*download* Aplikasi *elsimil*, catin jadi merasa tidak perlu untuk menggunakan aplikasi *elsimil*. Bahkan hal ini kadang juga didukung perangkat atau pak modin yang menganggap bahwa men-*download* aplikasi *elsimil* itu tidak penting karena itu bukan persyaratan nikah jadi tidak perlu. Sementara itu kalau kita cermati di dalam aplikasi *elsimil* itu ada edukasi terkait kesiapan calon pengantin untuk mempersiapkan dirinya dalam kehamilan, kemudian dengan mengisi kuisisioner dalam aplikasi itu catin tau apa saja yang harus dipersiapkan dalam menikah, baik mentalnya maupun fisiknya. Selain itu dari aplikasi *elsimil* juga nanti akan muncul sertifikat apakah ideal untuk menikah atau belum, seperti dari segi umur, maupun kesehatan. Akan tetapi meskipun muncul hasilnya tidak ideal bukan berarti menggagalkan pernikahan. Misalkan pihak laki-laki merupakan perokok aktif kan itu kategori tidak ideal hanya akan diberi peringatan agar mengurangi.

Kendala selanjutnya adalah pendampingan ibu hamil dan ibu pasca hamil. Untuk ibu hamil minimal 8 kali pendampingan dan untuk pasca ini minimal 2 kali pendampingan. Kendala pendampingan adalah ada ibu hamil yang tidak diinginkan kehamilannya, untuk kondisi seperti ini pasti lebih tertutup, sehingga TPK tidak mengetahui ditambah lagi ibu hamil maupun keluarganya tidak proaktif sehingga kadang terlepas dari pendampingan. Selain itu ketika TPK mendapat informasi dan didatangi malah menolak dan merasa tidak mengalami keluhan apapun. Sehingga kalau sasaran sendiri tertutup dan tidak proaktif kepada pendamping, tentunya pendamping kesulitan menganalisa atau mendeteksi kendala yang ada. Kalau untuk ibu hamil lainnya ada yang merasa malas terlalu sering dikunjungi karena hasil periksa rutin ke rumah sakit sudah dilakukan jadi merasa tidak perlu pendampingan lagi dari TPK. Kemudian untuk ibu yang pasca hamil ini tidak memiliki banyak kendala karena sudah familier dengan pendampingan, hanya saja terkadang masih

bingung mau KB apa yang aman serta faskes mana yang harus didatangi.

Terkait pendampingan Balita dan Baduta tidak mengalami banyak kendala berarti, hanya perlu lebih ditekankan kepada orang tua untuk rutin mengikuti posyandu. Karena seringkali orang tua merasa bayinya sehat sehingga merasa tidak perlu ikut posyandi. Padahal dalam posyandu ini banyak informasi terkait inovasi-inovasi makanan sehat bagi anak agar terhindar dari *Stunting*.

Optimalisasi Peran Tim Pendamping Keluarga

Salah satu strategi dalam rangka penurunan *Stunting* di Kabupaten Blitar adalah dengan mengoptimalkan peran TPK. jawab semua pihak, termasuk masyarakat di dalamnya. Pencegahan *Stunting* tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tetapi merupakan tanggung jawab semua pihak, termasuk masyarakat di dalamnya. Pola pikir masyarakat harus diubah dalam menangani *Stunting*, salah satu upayanya dengan pemberian pendampingan/bimbingan terhadap keluarga tentang *Stunting* dan permasalahannya. Sesungguhnya problematika *Stunting* tidak terjadi pada keluarga yang tidak mampu saja tetapi pada keluarga mampu juga bisa terjadi, dan dapat terjadi baik di masyarakat perdesaan maupun masyarakat perkotaan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilaksanakan dengan beberapa narasumber, peran TPK dalam melaksanakan pendampingan di Kabupaten Blitar sudah optimal. TPK dinilai dapat melaksanakan tugasnya dengan sesuai SOP dan sangat telaten dalam mendampingi sasaran.

Peran TPK dalam melaksanakan pendampingan kepada sasaran ini tidak terlepas dari kerjasama perangkat desa. Contohnya RT yang senantiasa berkonsultasi atau bermusyawarah dengan modin ketika ada calon pengantin yang mau menikah. Ketika ada calon pengantin yang datang kepada RT untuk memenuhi persyaratan pernikahan langsung diarahkan untuk mendownload aplikasi elsimil dan segera berkoordinasi dengan TPK. Dengan diharapkan juga untuk calon pengantin yang

bekerja di luar kota mendapatkan pendampingan yang maksimal dari TPK. Karena tujuan pendampingan ini sekali lagi selain untuk penurunan angka *Stunting* juga untuk mencegah agar tidak muncul kasus *Stunting* baru. Selain itu dari Pihak TPK sendiri juga terus berinovasi, seperti mengadakan MOU, memasang tulisan-tulisan pencegahan *Stunting* dan menggunakan identitas pin TPK serta membuat menu-menu sederhana dari bahan lokal yang bergizi. Tentunya kerjasama dan koordinasi yang baik terus dilaksanakan untuk mengatasi berbagai kendala yang ada dan dalam rangka mengoptimalkan peran TPK dalam penurunan angka *Stunting* di Kabupaten Blitar. Terkait bagaimana alur mulai dari penunjukan TPK, Pembinaan dan Pengarahan, serta optimalisasi peran TPK .

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data, penulis memperoleh kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai Optimalisasi Peran TPK dalam penurunan Stunting di Dinas P3APPKB adalah sebagai berikut: (1) Peran Tim Pendamping Keluarga (TPK) sangat penting dan sudah dilaksanakan sesuai dengan SOP mengacu pada Buku Panduan Pelaksanaan Pendampingan Keluarga yang diterbitkan oleh BKKBN dan Peraturan Presiden Nomor 72 Tentang Percepatan Penurunan Stunting. (2) Beberapa kendala dialami dalam pelaksanaan peran Tim Pendamping Keluarga (TPK), seperti kurangnya komunikasi antar kader TPK, kurangnya kualitas SDM yang memahami teknologi terkini terutama dalam hal menginstal aplikasi, dan juga masih kurangnya sosialisasi yang massive terhadap masyarakat tentang pentingnya pendampingan TPK untuk mencegah dan mengurangi angka Stunting di Kabupaten Blitar. (3) Pelaksanaan peran pendampingan oleh TPK sudah dijalankan dengan optimal, hal ini dibuktikan dengan banyaknya inovasi. Inovasi yang dilakukan oleh TPK antara lain sering melaksanakan koordinasi dengan Kasi Kesejahteraan pada Kantor Desa (pak modin) untuk

pendampingan calon pengantin (catin), kemudian mengadakan MOU dengan KUA, memasang tulisan-tulisan pencegahan Stunting dan ajakan untuk men-download aplikasi elektronik siap nikah dan hamil (elsimil), serta menggunakan identitas pin TPK saat melaksanakan kunjungan untuk sebagai bentuk identitas diri. Selain itu juga berinovasi dalam membuat menu-menu sederhana untuk nantinya sebagai menu wajib yang diberikan kepada posyandu di setiap desa yaitu dapur sehat atasi Stunting “DAHSYAT” itu menggunakan bahan lokal yang ada di desa masing-masing, contoh ikan, spirulina, dan sayur-sayuran di mix dibuat menu sehingga balita menjadi tertarik. Selain itu hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang diterbitkan oleh kementerian Kesehatan pada 09 Februari 2023 menunjukkan bahwa Kabupaten Blitar berada pada peringkat 11 dengan skor 14,3.

E. Referensi

- Moleong, Lexy J. 2018. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Prastowo, Andi. 2012. Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian. Yogyakarta: Ar-ruzzmedia.
- Purwanto, Ngalim. 2010. Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran. Jakarta: Remaja Rosdakarya.
- Singiresu S Rao, John Wiley dan Sons 2009, Engineering Optimalization: Theory and Practice, Fourth Edition
- Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2012. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Supriasa. 2002. Penilaian Status Gizi. Buku Kedokteran. Jakarta: EGC.
- Torang, Syamsir. Organisasi dan Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya, dan Perubahan Organisasi). Bandung: Alfabeta. 2014.
- Winardi, 1996. Perilaku Organisasi (Organizational Behaviour). Bandung : Tarsito.
- Wiryasaputra, Totok S. 2006. Ready to Care: Pendamping dan Konseling Psikoterapi. Yogyakarta: Galang Press
- Kementerian Kesehatan Indonesia. 2018. Buku Saku Pemantauan Status Gizi Tahun 2017. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2010. World Health Organization (WHO). 2014. CHILDHOOD STUNTING: Challenges and opportunities. Department of Nutrition for Health.
- WHO. 2014. “WHA Global Nutrition Target 2025: Stunting Policy Brief.” European journal of clinical nutrition 92(1): 819–25.
- UNICEF. 2012. Ringkasan kajian gizi Oktober 2012. Jakarta: UNICEF Indonesia
- UNICEF. 2013. Improving child nutrition, the achievable imperative for global progress. New York: United Nations Children’s Fund.
- WHO, UNICEF. 2017. Global nutrition monitoring framework: operational guidance for tracking progress in meeting targets for 2025. Geneva: World Health Organization;
- World Health Organization. 2017. Childhood Stunting: Challenges and opportunities, Report of Promoting Healthy Growth and Preventing Childhood Stunting Collegium. Geneva: World Health Organization